



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu dilakukan penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lainnya dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dan butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dengan teori umum dan seni untuk pemecahan masalah, serta memberikan pengajaran dengan cara sistematis.
12. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dengan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing dan rumpun jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Daerah serta berada dibawah instansi pengguna jabatan fungsional.

Pasal 3

Tugas pokok jabatan fungsional disesuaikan dengan bidangnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang sudah ada, dan/atau yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 5

Pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan karir jabatan fungsional dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian integral dari sistem pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

Pasal 7

- (1) Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional.

Pasal 8

Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perpindahan pegawai negeri sipil antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan lainnya dapat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah melalui koordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

**BAB VI
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 12

- (1) Kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan fungsional diberikan tunjangan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk setiap rumpun jabatan fungsional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...22/1/2010
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ...2010... NOMOR ...23...

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 - 1 - 2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 23 TAHUN 2010

TANGGAL : 19 - 1 - 2010

TENTANG : PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYADAFTAR JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

| NO | NAMA JABATAN FUNGSIONAL / INSTANSI | NO. KEPUTUSAN / TANGGAL | INSTANSI PEMBINA |
|----|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Perawat | 94/KEP/M.PAN/11/2001 07/11/2001 | Departemen Kesehatan |
| 2 | Dokter | 139/KEP/M.PAN/11/2003 07/11/2003 | Departemen Kesehatan |
| 3 | Dokter Gigi | 141/KEP/M.PAN/11/2003 07/11/2003 | Departemen Kesehatan |
| 4 | Pengawas Farmasi dan Makanan | 48/KEP/M.PAN/8/2002 16/08/2002 | Departemen Kesehatan |
| 5 | Apoteker | PER/07/M.PAN/ 4/2008 15/04/2008 | Departemen Kesehatan |
| 6 | Asisten Apoteker | PER/08/M.PAN/4/2008 15/04/2008 | Departemen Kesehatan |
| 7 | Pranata Laboratorium Kesehatan | 07/KEP/M.K.WASPAN/2/2000 07/02/2000 PER/08/M.PAN/3/2006 28/03/2006 | Departemen Kesehatan |
| 8 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 58/KEP/M.PAN/8/2002 14/08/2002 | Departemen Kesehatan |
| 9 | Epidemiolog Kesehatan | 17/KEP/M.PAN/11/2000 30/11/2000 | Departemen Kesehatan |
| 10 | Entomolog Kesehatan | 18/KEP/M.PAN/11/2000 30/11/2000 | Departemen Kesehatan |
| 11 | Sanitarian | 19/KEP/M.PAN/11/2000 30/11/2000 Jo.PER/10/M.PAN/3/2006 29/03/2006 | Departemen Kesehatan |
| 12 | Administrator Kesehatan | 42/KEP/M.PAN/12/2000 22/12/2000 | Departemen Kesehatan |
| 13 | Perawat Gigi | 22/KEP/M.PAN/4/2001 04/04/2001 Jo.PER/14/M.PAN/3/2006 29/03/2006 | Departemen Kesehatan |
| 14 | Nutrisionis | 23/KEP/M.PAN/4/2001 04/04/2001 | Departemen Kesehatan |
| 15 | Bidan | 01/PER/M.PAN/1/2008 28/01/2008 | Departemen Kesehatan |
| 16 | Radio Grafer | 133/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 Jo.PER/16/M.PAN/3/2006 29/03/2006 | Departemen Kesehatan |
| 17 | Perekam Medis | 135/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 Jo.PER/15/M.PAN/3/2006 29/03/2006 | Departemen Kesehatan |
| 18 | Teknisi Elektromedis | 41/KEP/M.PAN/4/2003 30/04/2003 | Departemen Kesehatan |
| 19 | Fisioterapis | KEP/04/M.PAN/1/2004 19/01/2004 Jo.PER/12/M.PAN/3/2006 29/03/2006 | Departemen Kesehatan |
| 20 | Refraksionis Optisien | PER/47/M.PAN/4/2005 21/04/2005 | Departemen Kesehatan |
| 21 | Terapis Wicara | PER/48/M.PAN/4/2005 21/04/2005 | Departemen Kesehatan |
| 22 | Ortotis Prostetis | PER/122/M.PAN/12/2005 30/12/2005 | Departemen Kesehatan |
| 23 | Okupasi Terapis | PER/123/M.PAN/12/2005 30/12/2005 | Departemen Kesehatan |
| 24 | Teknisi Transfusi Darah | PER/05/M.PAN/4/2007 30/04/2007 | Departemen Kesehatan |
| 25 | Teknisi Gigi | PER/06/M.PAN/4/2007 30/04/2007 | Departemen Kesehatan |
| 26 | Psikolog Klinis | PER/11/M.PAN/4/2008 26/05/2008 | Departemen Kesehatan |
| 27 | Fisikawan Medis | PER/12/M.PAN/5/2008 26/05/2008 | Departemen Kesehatan |
| 28 | Dokter Pendidik Klinis | PER/307/M.PAN/9/2008 16/09/2008 | Departemen Kesehatan |
| 29 | Guru | 84/1993 24/12/1993 | Departemen Pendidikan Nasional |
| 30 | Pengawas Sekolah | 91/KEP/M.PAN/10/2001 31/10/2001 | Departemen Pendidikan Nasional |
| 31 | Pamong Belajar | 25/KEP/M.K.WASPAN/6/1999 18/06/1999 | Departemen Pendidikan Nasional |
| 32 | Dosen | 38/KEP/M.K.WASPAN/8/1999 24/08/1999 | Departemen Pendidikan Nasional |
| 33 | Penilik | 15/KEP/M.PAN/3/2002 21/03/2002 | Departemen Pendidikan Nasional |
| 34 | Pengembang Teknologi Pembelajaran | PER/02/M.PAN/3/2009 10/03/2009 | Departemen Pendidikan Nasional |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 35 | Penyuluh Kehutanan | 130/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 Jo.PER/33/M.PAN/10/2006 12/10/2006 | Departemen Kehutanan |
| 36 | Polisi Kehutanan | 55/KEP/M.PAN/7/2003 02/07/2003 | Departemen Kehutanan |
| 37 | Pengendali Ekosistem Hutan | 54/KEP/M.PAN/7/2003 02/07/2003 | Departemen Kehutanan |
| 38 | Instruktur | 36/KEP/M.PAN/3/2003 28/03/2003 | Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 39 | Penggerak Swadaya Masyarakat | KEP/58/M.PAN/6/2004 14/06/2004 | Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 40 | Pengantar Kerja | 06/KEP/M.K.WASPAN/2/2000 07/02/2000 | Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 41 | Perantara Hubungan Industrial | 40/KEP/M.PAN/12/2000 22/12/2000 | Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 42 | Mediator Hubungan Industrial | PER/06/M.PAN/4/2008 27/04/2009 | Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 43 | Pengawas Ketenagakerjaan | 35/KEP/M.PAN/3/2003 28/03/2003 | Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 44 | Pekerja Sosial | 03/M.PAN/1/2004 26/01/2004 | Departemen Sosial |
| 45 | Penyuluh Sosial | PER/06/M.PAN/4/2008 09/04/2008 | Departemen Sosial |
| 46 | Penguji Mutu Barang | 131/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 KEP/05/M.PAN/1/2005 13/01/2005 | (DEPERINDAG) Departemen Perdagangan |
| 47 | Penera | 128/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 KEP/03/M.PAN/1/2005 38365 | (DEPERINDAG) Departemen Perdagangan |
| 48 | Penyuluh Perindag | 129/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 Jo. KEP/04/M.PAN/1/2005 13/01/2005 | (DEPERINDAG) Departemen Perdagangan |
| 49 | Penyuluh Pertanian | PER/02/M.PAN/2/2008 18/02/2008 | Departemen Pertanian |
| 50 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | 56/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 30/09/1999 Jo.KEP/137/M.PAN/ 9/2004 30/09/2004 | Departemen Pertanian |
| 51 | Pengawas Benih Tanaman | 57/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 30/09/1999 Jo.KEP/137/M.PAN/ 9/2004 30/09/2004 | Departemen Pertanian |
| 52 | Medik Veteriner | 59/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 30/09/1999 | Departemen Pertanian |
| 53 | Paramedik Veteriner | 60/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 30/09/1999 Jo.KEP/137/M.PAN/ 9/2004 30/09/2004 | Departemen Pertanian |
| 54 | Pengawas Bibit Ternak | 61/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 30/09/1999 Jo.KEP/137/M.PAN/ 9/2004 30/09/2004 | Departemen Pertanian |
| 55 | Pengawasan Mutu Pakan | KEP/31/M.PAN/3/2004 18/03/2004 | Departemen Pertanian |
| 56 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian | PER/17/M.PAN/12/2006 11/04/2006 | Departemen Pertanian |
| 57 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | 36/KEP/M.PAN/5/2001 25/05/2001 Jo.PER/51/M.PAN/4/2005 27/04/2005 | Departemen Kelautan |
| 58 | Pengawas Benih Ikan | 37/KEP/M.PAN/5/2001 25/05/2001 Jo.PER/52/M.PAN/4/2005 27/04/2005 | Departemen Kelautan |
| 59 | Pengawas Perikanan | 35/KEP/M.PAN/5/2001 25/05/2001 Jo.PER/50/M.PAN/4/2005 27/04/2005 | Departemen Kelautan |
| 60 | Penyuluh Perikanan | PER/19/M.PAN/10/2008 | Departemen Kelautan |
| 61 | Pengawas Keselamatan Pelayaran | KEP/195/M.PAN/12/2004 10/12/2004 | Departemen Perhubungan |
| 62 | Penguji Kendaraan Bermotor | 150/KEP/M.PAN/11/2003 21/11/2003 | Departemen Perhubungan |
| 63 | Pengendali Frekuensi Radio | PER/27/M.PAN/5/2006 31/05/2006 | Departemen Perhubungan |
| 64 | Penyelidik Bumi | 67/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 04/10/1999 | Departemen Energi dan SDM |
| 65 | Inspektur Ketenagalistrikan | 21/KEP/M.PAN/4/2002 19/04/2002 | Departemen Energi dan SDM |
| 66 | Inspektur Tambang | 22/KEP/M.PAN/4/2002 19/04/2002 | Departemen Energi dan SDM |
| 67 | Inspektur Minyak dan Gas | 23/KEP/M.PAN/4/2002 19/04/2002 | Departemen Energi dan SDM |
| 68 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan | 30/KEP/M.PAN/3/2002 07/12/2002 | Departemen Keuangan |
| 69 | Penyuluh Pajak | PER/04/M.PAN/2/2006 28/02/2006 | Departemen Keuangan |
| 70 | Pamong Budaya | 62/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 30/09/1999 | Departemen Kebudayaan dan Pariwisata |

| | | | |
|----|--|---|-----------------------------------|
| 71 | Kataloger | PER/07/M.PAN/5/2007 30/05/2007 | Departemen Pertahanan |
| 72 | Penata Ruang | PER/10/M.PAN/6/2007 18/06/2007 | Departemen Pekerjaan Umum |
| 73 | Perancang Peraturan Perundang-undangan | 41/KEP/M.PAN/12/2000 22/12/2000 | Departemen Kehakiman dan HAM |
| 74 | Teknik Pengairan | 63/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 01/10/1999 | KIMPRASWIL |
| 75 | Teknik Jalan dan Jembatan | 64/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 01/10/1999 | KIMPRASWIL |
| 76 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | 65/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 01/10/1999 | KIMPRASWIL |
| 77 | Teknik Penyehatan Lingkungan | 66/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 01/10/1999 | KIMPRASWIL |
| 78 | Pranata Komputer | 66/KEP/M.PAN/7/2003 17/07/2003 | Badan Pusat Statistik |
| 79 | Statistisi | 37/KEP/M.PAN/4/2003 07/04/2003 | Badan Pusat Statistik |
| 80 | Pengendali Dampak Lingkungan | 47/KEP/M.PAN/8/2002 16/08/2002 | Menteri Negara Lingkungan Hidup |
| 81 | Penerjemah | PER/24/M.PAN/5/2006 19/05/2006 | Sekretariat Negara |
| 82 | Analisis Kepegawaian | PER/36/M.PAN/11/2006 15/11/2006 | Badan Kepegawaian Nasional |
| 83 | Auditor | 19/1996 02/05/1996 Jo.PER/220/M.PAN/7/2008 | BPK dan BPKP |
| 84 | Perekayasa | PER/219/M.PAN/7/2008 39633 | Ristek BPPT |
| 85 | Arsiparis | 09/KEP/M.PAN/2/2003 01/02/2003 Jo.KEP/34/M.PAN/3/2004 25/03/2004 | Arsip Nasional Republik Indonesia |
| 86 | Pustakawan | 132/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 | Perpustakaan Nasional |
| 87 | Penyuluh Keluarga Berencana | KEP/120/M.PAN/9/2004 02/09/2004 | BKKBN |
| 88 | Perencana | 16/KEP/M.PAN/3/2001 19/03/2001 | BAPPENAS |
| 89 | Surveyor Pemetaan | 134/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 | BAKOSURTANAL |
| 90 | Operator Transmisi Sandi | 133/KEP/M.PAN/11/2003 03/11/2003 | L S N |
| 91 | Sandiman | 134/KEP/M.PAN/11/2003 03/11/2004 | L S N |
| 92 | Pranata Hubungan Masyarakat | PER/109/M.PAN/11/2005 01/11/2005 | L I N |

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22/11/2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 23